

BAB III

PENCURIAN IKAN

Pencurian ikan menjadi permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Pencurian ikan menjadi permasalahan terutama di negara-negara yang bersebelahan laut secara langsung ataupun tidak. Sebagai gambaran, di Indonesia sendiri banyak kasus pencurian dimana pelakunya bahkan dari bukan negara yang bersebelahan. Cina, Norwegia, dan bahkan nelayan-nelayan yang memang sudah menjadi buronan Interpol.

A. Kasus Pencurian Ikan di Wilayah Perairan Indonesia

Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan, mengandung sumber daya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya, sejak dulu dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia secara turun temurun. Dengan telah disahkannya rezim hukum Zona Ekonomi Eksklusif dalam lingkup Hukum Laut Internasional yang baru, maka sumber daya ikan milik bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan Landasan Konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan.¹

Berdasarkan perkiraan secara keseluruhan potensi lestari sumber daya perikanan laut Indonesia berjumlah 6.6 juta ton/tahun, terdiri dari 4.5 juta ton di perairan Indonesia dan 2.1 juta ton di perairan ZEE. Perkiraan potensi tersebut berasal dari beberapa jenis ikan laut, yaitu

¹ Si Mbah, Bunyi Pasal 33 UUD 1945 (1-5) dan pembahasannya, si-pedia, 2014, <http://www.si-pedia.com/2014/03/bunyi-pasal-33-uud-1945-1-5-dan-pembahasannya.html/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 17.59 WIB

ikan pelagis kecil 3.5 ton, ikan perairan karang 0.048 juta ton per tahun. Perairan laut Indonesia memiliki banyak sekali jenis ikan (sekitar 3.000 jenis). Banyaknya jenis ikan tersebut tidak berarti diikuti kelimpahan populasi untuk setiap jenisnya, walaupun diakui beberapa jenis di antaranya seperti ikan lemuru, ikan laying, ikan cakalang, serta berbagai jenis ikan lainnya mempunyai populasi cukup besar.²

Penangkapan jenis-jenis ikan laut dibagi sesuai dengan kebutuhan di luar negeri dan dalam negeri sebagai berikut:

- a. Udang panaeid yang ditangkap di perairan Irian Jaya, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Sumatera adalah komoditi utama.
- b. Ikan tuna dan Cakalang merupakan komoditi ekspor kedua setelah udang dengan daerah penangkapan di perairan Indonesia bagian timur, terutama perairan Maluku dan Irian Jaya, Samudera Hindia, maupun perairan ZEE.
- c. Jenis Ikan selain udang, tuna, dan cakalang yang diekspor dengan jumlah dan nilai besar adalah ikan kakap, kerapu, baronag, tenggiri, serta beberapa ikan hias.³

Beragamnya sumber daya hayati tersebut tentu saja membuat Indonesia rentan akan berbagai tindak pencurian di wilayah perairannya. Terlebih Indonesia adalah negara yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangganya. Untuk masalah perbatasan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki perairan yang berbatasan langsung dengan 10 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste.

² <http://dokumen.tips/documents/potensi-perikanan-indonesia.html/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 16.35 WIB

³ <http://www.bi.go.id/id/umkm/kelayakan/pola-pembiayaan/perikanan/Documents/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 18.45 WIB

Melihat potensi kelautan nasional yang sangat besar, tentu saja hal tersebut akan menarik perhatian negara lain untuk turut mengeksploitasi hasil sumber daya laut yang dimiliki Indonesia dan inilah yang menyebabkan wilayah Indonesia menjadi tempat paling sering terjadinya *Illegal Fishing*. Banyaknya sumber daya alam ditambah ramainya jalur perairan yang ada di perairan Indonesia yang seharusnya menjadi sebuah keuntungan bagi Indonesia, akan tetapi apa jadinya jika perairan Indonesia yang terbilang luas, padat dan jalur transportasi ekspor dan impor ke negara-negara tetangga terusik akibat dari terjadinya aksi *Illegal Fishing* di perairan Indonesia.

Kegiatan *Illegal Fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*), dengan kesimpulan bahwa *Illegal Fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi ZEE (*Exclusive Economic Zone*) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*). Pada umumnya, jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan *trawl*. Kegiatan *Illegal Fishing* juga dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII).

Modus atau jenis kegiatan *Illegal* yang sering digunakan KII, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan *transmitter* (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang *transmitter*), dan penangkapan ikan yang merusak

(*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, atau alat yang membahayakan sumberdaya ikan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Illegal Fishing* di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri. Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 faktor.

Pertama, kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan dunia menurun, terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia untuk berburu ikan di manapun dengan legal atau *Illegal*.

Kedua, disparitas atau perbedaan harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.

Ketiga, *Fishing Ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.

Keempat, Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan *Illegal Fishing*

Kelima, Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*). Hal

ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi faktual geografi Indonesia, khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.

Keenam, masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai dengan tahun 2008, baru terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan), dan 340 Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Pengawas Perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi. Hal ini, lebih diperparah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan.

Ketujuh, persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid. Terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.

1. Selat Malaka

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menangkap tujuh kapal pencuri ikan asal Malaysia di perairan Selat Malaka. Ketujuh kapal ini memperkerjakan 36 Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI). Dari hasil mencuri, ketujuh kapal tersebut telah mengambil ikan aneka macam sebanyak 10 ton lebih. Selain kapal, barang bukti yang turut diamankan adalah Sembilan unit alat lengkap (trawl) tujuh unit alat navigasi (GPS), tujuh unit kompas, dan 16 unit alat komunikasi radio.⁴

Kepala PSDKP Batam Akhmadon mengatakan, ketujuh kapal tersebut tertangkap kapal KKP yang sedang melakukan operasi di perairan Selat Malaka. Saat dilakukan pemeriksaan,

⁴ Muhammad Bunga Ashab, 7 Kapal Malaysia Mencuri 10 Ton Ikan di Perairan Indonesia <http://daerah.sindonews.com/read/1085166/194/7-kapal-malaysia-mencuri-10-ton-ikan-di-perairan-indonesia-1455428546/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 02.33 WIB

kapal-kapal tersebut tidak memiliki dokumen yang sah. Kapal-kapal tersebut juga menangkap ikan dengan menggunakan alat terlarang. Mereka ingin mengelabui petugas pengawasan perikanan dengan memperkerjakan WNI untuk mencuri ikan di Indonesia.⁵

Pada tahun 2015 PSDKP telah menangkap kapal pencuri ikan sebanyak 20 kapal. Terdiri dari kapal Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Walaupun terdapat WNI yang telah melakukan pencurian, namun tidak ada keringanan hukum bagi WNI yang telah melanggar Undang-Undang (UU) perikanan.⁶

2. Perairan Kalimantan Utara

Dua kapal tertangkap basah melakukan pencurian ikan secara ilegal di Perairan Karang Unarang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Nunukan, Kalimantan Utara, pada pertengahan Februari 2015. Kawasan ini memang berbatasan dengan Malaysia. Kapal tersebut adalah KM Rizki, yang membawa muatan ikan campuran sekiter 300 kg dan 200 kg udang campuran. Sedangkan KM Satria, membawa muatan ikan campuran sekitar 50 kg dan udang campuran sebanyak 80 kg.⁷

Menurut Wakil Direktur Polisi Air Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Kombes Pol. Bustomy Sanap, dua kapal tersebut terbuat dari kayu dan kedapatan menangkap ikan menggunakan trawl. Dia menjelaskan, dua kapal ini sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Sehingga bisa dieksekusi dan diledakkan, karena merupakan hasil keputusan pengadilan. Dia juga menjelaskan bahwa peledakkan dan penenggelaman kapal adalah

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ Awaluddin Jalil, Polda Kaltim Ledakkan 2 Kapal Nelayan Malaysia, sindonews 2015
<http://daerah.sindonews.com/read/978936/174/polda-kaltim-ledakan-2-kapal-nelayan-malaysia-1426772250/>
diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 03.31 WIB

sebagai bentuk upaya untuk menciptakan efek jera bagi nelayan asing yang berani mencuri ikan di wilayah hukum Indonesia.⁸

Para nelayan setempat pun sangat setuju dengan peledakkan tersebut, karena memang nelayan asing sering sekali mencuri ikan di perairan Indonesia, khususnya di daerah Perairan Karang Unarang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sehingga mereka seringkali harus mencari ikan hingga sangat jauh dari pantai karena adanya kapal tersebut. Di samping itu, nelayan juga seringkali hanya mendapatkan ikan dalam jumlah yang lebih sedikit karena adanya pencurian ikan oleh nelayan asing yang memakai jaring lebih panjang, dan lebar, bahkan memakai cara *trawl*.⁹

Para nelayan juga seringkali bingung karena kapal tersebut mempunyai nama hampir mirip dengan nama-nama yang ada di Indonesia. Lebih parahnya, para Anak Buah Kapal (ABK) dari kapal tersebut adalah berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di kapal Malaysia.¹⁰

3. Perairan Natuna

Di perairan Natuna, banyak kapal asing melakukan pencurian ikan, mulai dari negara-negara Cina, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan bahkan kapal-kapal yang memang sudah menjadi buronan Interpol. Ribuan ton ikan ditangkap secara *illegal*, Indonesia merugi triliunan rupiah, hingga rusaknya ekosistem laut menjadi deretan permasalahan yang terjadi di Perairan Natuna. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menjelaskan wilayah

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

perairan Natuna hingga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut China Selatan sebagai wilayah yang paling rawan pencurian ikan oleh kapal asing.¹¹

Bukti bahwa perilaku kompleks dari *Illegal Fishing* adalah salah satunya ketika nahkoda KM PKFA milik Malaysia, Sutikno, yang berkewarganegaraan Indonesia menjelaskan bahwa, sulitnya pekerjaan di negeri sendiri memaksa puluhan warga Indonesia bekerja di kapal Malaysia. Upah yang besar mereka dapatkan, ketika mereka dipaksa mencuri ikan oleh pemilik kapal Malaysia di perairan Indonesia.

Sebenarnya, gaji besar yang mereka dapatkan pun menjadi tidak sebanding dengan keuntungan yang dikeruk oleh kapal Malaysia. Puluhan warga Indonesia tersebut diperkerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) kapal Malaysia dengan rincian gaji sekitar 100 ringgit perhari. Dia juga menjelaskan bahwa mereka ketika kembali ke Malaysia harus membawa ikan, walaupun harus menangkap ikan di perairan Indonesia.¹²

Pemerintah Indonesia menjelaskan, melalui Deputi Koordinasi Bidang Kelautan Maritim, Kementerian Maritim dan Sumber Daya Arif Havas Oegrosono, bahwa salah satu solusi untuk memaksimalkan pemanfaatan perairan Natuna adalah dengan memberikan izin pada kapal nelayan dari Pantai Utara (Pantura) untuk dapat melaut di Natuna. Dia juga menjelaskan, bahwa Kementerian Maritim dan Sumber Daya telah membahas langkah-

11

<http://regional.kompas.com/read/2009/06/24/19111853/perairan.natuna.paling.rawan.pencurian.ikan.oleh.kapal.asing/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 03.31 WIB

¹² Muhammad Bunga Ashab, Pengakuan ABK yang Bekerja di Kapal Malaysia Dipaksa Mencuri Ikan di Indonesia <http://daerah.sindonews.com/read/1085199/194/pengakuan-abk-bekerja-di-kapal-malaysia-dipaksa-mencuri-ikan-di-indonesia-1455443079/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 04.00 WIB

langkah strategis untuk mengatasi pencurian ikan di laut Natuna. Empat langkah strategis yang disiapkan yaitu di bidang perikanan, pariwisata, minyak dan gas serta pertahanan.¹³

B. Sumbangsih pendapatan di Natuna terhadap nilai ekonomi Indonesia

Berdasarkan FAO, pada tahun 2004, Indonesia merupakan negara produsen terbesar kelima di dunia dalam perikanan tangkap dan budidaya, setelah China, Peru, AS, dan Cili. Pada tahun 2009, Pemerintah menargetkan nilai ekspor menjadi US\$ 3 Miliar. Sayangnya target itu tidak mungkin tercapai karena kini Indonesia sudah melampaui ambang batas produksi 0% dari total stok perikanannya pada tahun 2007 sebesar 6.44 juta ton dengan pemanfaatan sebanyak 5.8 juta ton (90.6%). Bahkan menurut perkiraan, jika ekosistem tidak dapat diselamatkan oleh pemerintah, maka Indonesia akan mengalami krisis ikan pada tahun 2015. Selain disebabkan oleh perusakan ekosistem laut oleh para pelaku penangkapan ikan, ancaman stok perikanan laut itu juga datang dari *Overfishing* dan *Illegal Fishing*.¹⁴

Oleh karena itu, salah satu cara untuk melihat potensi ekonomi suatu wilayah penelitian adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut. Dalam hal ini, penulis akan menjabarkan sumbangsih PDRB Natuna, yang berada di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) menurut Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau (BPS-Kepri).¹⁵

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat

¹³ Laily Rahmawati, Pemerintah izinkan nelayan Pantura melaut di Natuna <http://www.antaraneews.com/berita/573042/pemerintah-izinkan-nelayan-pantura-melaut-di-natuna/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 04.41 WIB

¹⁴ Lukita Grahayarini, Menyikapi Kemelut Perikanan, harian Kompas, 10 April 2008, diakses pada tanggal 05 September 2016 pukul 08.43 WIB

¹⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, http://kepri.bps.go.id/website/pdf_publicasi/PDRB-Kepulauan-Riau-Menurut-Lapangan-Usaha-2009-2014.pdf/ diakses pada tanggal 05 September 2016 pukul 08.46 WIB

berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.¹⁶

Untuk perikanan sendiri, meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, budidaya segala jenis ikan dan biota lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, *crustacea*, *mollusca*, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (dilaut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicapuk juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.¹⁷

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS.¹⁸

Namun, penulis akan menjabarkan bagian Kategori Perikanannya saja, karena penelitian ini penulis fokuskan pada perikanan. Berikut adalah tabelnya

¹⁶ *Ibid.*

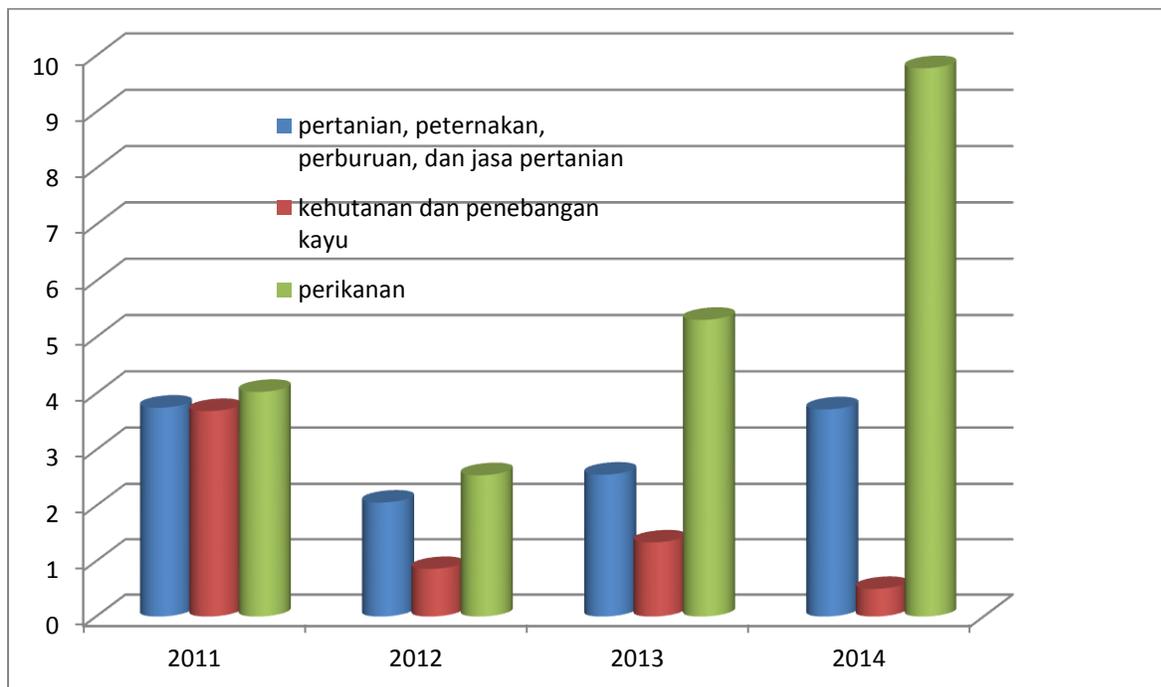
¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Kategori Perikanan Tahun 2011-2014 (persen)

Kategori Perikanan			
2011	2012	2013*	2014**
3.93	2.36	4.29	7.58

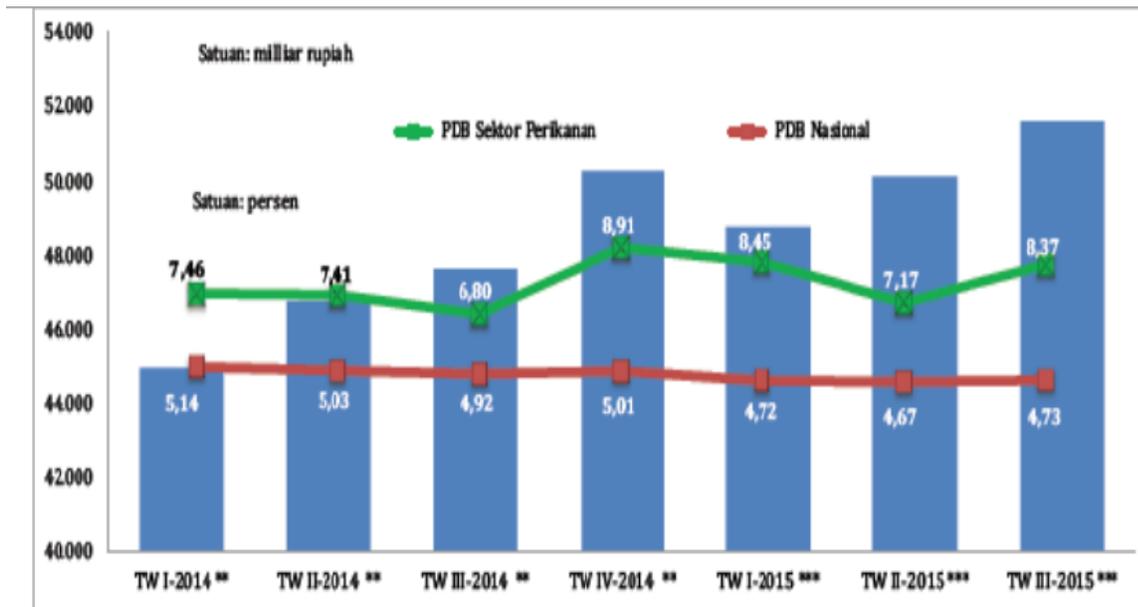
Sumber: BPS-Kepri 2011-2014 (Keterangan: * Angka Sementara ** Angka sangat sementara)¹⁹



¹⁹ Ibid.

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (persen), 2011-2014.²⁰

Sumber: BPS-Kepri 2011-2014.²¹



Gambar 1.2 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDB Triwulan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2014-2015.²²

Sumber: Pusat data Statistik KKP. (Keterangan: * Angka Sementara ** Angka sangat sementara *** Angka sangat sangat sementara).²³

Sedangkan untuk, Kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional berdasarkan harga berlaku, 2010-2015 bisa dilihat di gambar sebagai berikut:

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/Publikasi/src/kpda2015.pdf>, diakses pada tanggal 07 September 2016 pukul 22.53 WIB

²³ Ibid.

Lapangan Usaha Industrial Origin	2010	2011	2012	2013*					2014**					2015***		
				I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,93	13,51	13,37	13,32	13,84	14,64	11,75	13,39	13,52	13,82	14,43	11,76	13,38	13,76	14,36	14,57
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	10,99	10,63	10,47	10,48	10,91	11,73	8,67	10,44	10,61	10,80	11,41	8,51	10,33	10,66	11,17	11,42
a. Tanaman Pangan	3,69	3,46	3,55	4,72	3,42	3,77	2,15	3,49	4,28	3,26	3,56	2,01	3,26	4,28	3,80	3,76
b. Tanaman Hortikultura	1,61	1,60	1,45	1,15	1,75	1,54	1,31	1,44	1,52	1,63	1,56	1,35	1,51	1,50	1,63	1,59
c. Tanaman Perkebunan	3,91	3,87	3,75	2,87	4,04	4,65	3,40	3,76	3,05	4,19	4,52	3,29	3,77	3,06	3,97	4,26
d. Peternakan	1,58	1,50	1,52	1,53	1,50	1,56	1,63	1,55	1,56	1,52	1,56	1,70	1,58	1,62	1,57	1,59
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,21	0,20	0,20	0,21	0,20	0,22	0,18	0,20	0,21	0,20	0,21	0,16	0,19	0,21	0,21	0,21
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,85	0,79	0,76	0,66	0,75	0,73	0,77	0,73	0,65	0,74	0,71	0,73	0,71	0,65	0,77	0,69
3. Perikanan	2,09	2,09	2,14	2,18	2,17	2,18	2,31	2,21	2,27	2,28	2,31	2,52	2,34	2,46	2,42	2,46
PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 1.3 Kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional berdasarkan harga berlaku, 2010-2015.²⁴

Sumber: Badan Pusat Statistik-Statistics Indonesia (Keterangan: * Angka Sementara ** Angka sangat sementara *** Angka sangat sangat sementara).²⁵

Triwulan III-2015 kontribusi subsektor perikanan (2.46 persen) lebih rendah daripada subsektor tanaman perkebunan (4.26 persen) dan kontribusi subsektor tanaman pangan (3.76 persen). Kontribusi subsektor tanaman perkebunan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 7.33 persen dibandingkan triwulan II-2015, hal tersebut disebabkan pada triwulan III-2015 masih dalam masa panen tanaman perkebunan.

Kontribusi PDB subsektor perikanan atas dasar harga berlaku triwulan II-2015 terhadap PDB Nasional menunjukkan kontribusi yang stabil (rata-rata 2.44 persen), hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah yang mencerminkan peningkatan *income* para pelaku subsektor

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

kelautan dan perikanan secara rata-rata pada triwulan III-2015 dibandingkan triwulan II-2014 (2.42) persen) dan triwulan I-IV tahun 2014 (rata-rata 2.34 persen).²⁶

Dari gambar-gambar dan tabel-tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, untuk pertumbuhan ekonomi di Natuna, jelas bahwa sektor perikanan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Potensi sumber daya pesisir dan laut di Indonesia begitu beragam baik dari segi kuantitas maupun kualitas, seharusnya dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia. Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang sangat potensial untuk dikembangkan. Ikan merupakan salah satu sumberdaya ekologi perairan Natuna yang kuantitasnya cukup banyak. Ikan dapat dijumpai pada hampir semua bagian perairan dengan jenis ikan terbanyak adalah ikan pelagis. sebagian besar wilayah perairan Kabupaten Natuna di perairan laut Cina Selatan. Inilah faktor mengapa Indonesia sangat memperjuangkan sektor ekonomi di bidang perikanan di Natuna, selain karena dapat menyumbang nilai ekonomi Indonesia, juga dapat melestarikan dan menjaga sumber daya laut Natuna yang sekaligus dapat meningkatkan Indonesia dalam hal Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor perikanan. Sementara sektor perikanan, sesuai dengan yang dikatakan Presiden Joko Widodo bahwa, selama ini sektor kelautan dan perikanan di Natuna belum dikembangkan dengan baik. Bahkan, dari laporan yang diterima 8.9% potensi perikanan yang telah dikembangkan di wilayah tersebut. Jokowi mengatakan bahwa, dirinya mendapat laporan produksi di sektor kelautan dan perikanan di Natuna hanya sebesar 8.9% dari potensi yang Indonesia miliki. Menurut Jokowi, potensi

²⁶ *Ibid.*

ekonomi sektor perikanan yang besar di wilayah tersebut perlu didorong dan lebih dipercepat lagi penangannya.²⁷

²⁷ Ahmad Naufal, Laju Industri Perikanan dan Migas di Natuna Dikebut Pemerintah, <http://www.islam-institute.com/laju-industri-perikanan-dan-migas-di-natuna-dikebut-pemerintah/> diakses pada tanggal 07 September 2016 pukul 21.56 WIB